

BAB III

EVALUASI KINERJA OTONOMI DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2008 BERDASAR PP No. 6/2008

A). Otonomi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008

Gempa 27 Mei 2006, telah sedikit banyak mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bantul tahun 2008. Namun daerah ini tetap dapat mengukir prestasi. Prestasi yang diraih pada tahun 2008 adalah prestasi di bidang pertanian dan pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, untuk jenjang SMA/MA dan SMA Kabupaten Bantul menduduki peringkat terbaik dalam kelulusan sekolah se- DIY dan terbaik kedua untuk jenjang SMP/MI's. Disamping itu beberapa sekolah, guru maupun siswa memperoleh penghargaan di tingkat DIY maupun nasional. Dalam bidang pertanian, Kabupaten Bantul mendapatkan penghargaan dari Presiden RI karena berhasil meningkatkan produksi padi di atas 5%. Selain itu Kabupaten Bantul juga telah berhasil meningkatkan produktivitas padi dari 7,2 ton/ha Gabah Kering Panen (GKP) menjadi 7,89 ton/ha GKP.

Beberapa keunggulan lain yang dicapai pada tahun 2008 diantaranya transparansi, kabupaten ini telah mampu membentuk beberapa sistem informasi daerah terutama sistem informasi manajemen kepegawaian secara elektronik. Di samping itu, pembentukan jaringan on line antar SKPD yang dalam hal ini

juga membuat daerah ini memperoleh prestasi. Melihat hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2008 Kabupaten Bantul telah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dengan baik.

Namun keberhasilan yang diperoleh juga tidak luput dari kendala. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun 2008 diantaranya mengenai masalah anggaran, aturan dan SDM yang masih belum cukup untuk mengoptimalkan tugas yang diperintahkan oleh pemerintah pusat.

Berikut ini merupakan petikan wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Bantul terkait dengan kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan otonomi daerah pada tahun 2008 :

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun 2008, diantaranya ; yang pertama, mengenai masalah anggaran, karena DAU (Dana Alokasi Umum) itu diperoleh dari pusat, sementara gaji para pegawai masih melekat dengan DAU. Jika gaji naik otomatis DAU juga naik. Hal ini yang membuat anggaran pembangunan jadi lebih kecil. Yang kedua, masalah aturan, optimalisasi antar departemen ataupun lembaga di tingkat pusat sangatlah diperlukan. Namun daerah itu sendiri masih terkendala dengan koordinasi antara pusat dengan daerah. Kendala yang terakhir adalah masalah SDM, yang dirasa belum cukup untuk bisa membuat otonomi daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah, karena kembali lagi bahwa DAU itu masih tergantung oleh pusat. Maka dari itu perlu diadakan diklat untuk peningkatan mutu SDM agar dapat mencapai derajat otonomi yang lebih baik.¹

Namun kendala yang dihadapi tersebut tidak menyurutkan niat pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan derajat otonomi daerah yang lebih baik. Maka dari itu pemerintah membuat perencanaan sebuah sistem yang pro

¹ Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantul, Ir. Pulung Haryadi, MSc. Pada tanggal 02/11/2010 di Kantor Bappeda Bantul

rakyat. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Bantul menganut sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang positif pada pertumbuhan. Selain itu, juga menganut *empathic government* bukan lagi *good government* seperti Bank Dunia. Sistem *empathic government* berarti pemerintah Kabupaten Bantul merupakan pemerintah yang peduli terhadap masyarakatnya.

Sementara itu untuk meningkatkan daya saing daerah agar tetap mampu bersaing dengan daerah lain. Ada beberapa teknik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Berikut kutipan wawancara penulis terkait dengan hal ini :

Dalam RPJMD dianut sistem yang mengandalkan kemampuan ekonomi lokal. Jadi ekonomi lokal betul-betul digali. Beberapa teknik untuk meningkatkan daya saing daerah, diantaranya peningkatan desain infrastruktur daerah, bekerjasama dengan ISI. Selanjutnya mempertahankan kualitas mutu ekonomi lokal, bekerjasama dengan forum multi stakeholder yang dinamakan forum pengembangan ekonomi lokal. Dalam hal potensi ekonomi lokal, nilai ekspor tertinggi datang dari industri kecil untuk keperluan expo. Seperti misalnya batik kayu dari Bantul yang pernah masuk dalam outlet terbesar di Rottersdam, Belanda.²

² Ibid

B). Interpretasi Data

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2008 mencapai 7.200.080 juta rupiah atas dasar harga berlaku dan 3.613.269 juta rupiah atas dasar harga konstan.

Tabel 3.1

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2003-2008

No	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan
1	2004	4.238.736	13.16%	3.080.313	5.04%
2	2005	4.898.268	15.56%	3.234.172	4.99%
3	2006	5.725.366	16.89%	3.299.648	2.02%
4	2007	6.489.251	13,34%	3.448.949	4,52%
5	2008	7.400.080	15,45%	3.613.269	4,76%

Sumber: Informasi LPPD Akhir Tahun Anggaran 2008, halaman 5

Atas dasar harga berlaku tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul meningkat dari 13,34% pada tahun 2007 menjadi 15,45% pada tahun 2008. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir (2004-2008) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14,88% atas dasar harga berlaku dan 4,34% atas dasar harga konstan.

Berikut ini merupakan kutipan wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Bantul terkait dengan peningkatan PDRB pada tahun 2008 :

Tahun 2008 merupakan puncak pembangunan pasca gempa 2006, dimana terdapat banyak dana dari berbagai elemen yang masuk. Sehingga berpengaruh pada lonjakan ekonomi dan peningkatan PDRB. Dengan adanya tata kelola yang dianut, yakni *empatic government* (pemerintahnya yang peduli terhadap rakyat) diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal.³

Jika dilihat dari peran sektor. Sektor yang paling berperan dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul tahun 2008 adalah sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena sektor-sektor lainnya, seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa tumbuh dengan laju yang lebih cepat.

b. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi Kabupaten Bantul pada Tahun 2008 adalah sebesar 10,26%, mengalami peningkatan dari tahun 2006 dan 2007. Berikut ini merupakan tabel perkembangan inflasi Tahun 2006-2008.

Tabel 3.2

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bantul Tahun 2006-2008

No	Tahun	Inflasi Kabupaten Bantul	Inflasi Kota Yogya	Inflasi Nasional
1	2006	7.61	10.4	6.6
2	2007	7.1	7.99	6.59
3	2008	10.26	9.88	11.06

Sumber : Sekilas Kabupaten Bantul

Laju inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 2008, meningkat tajam dari tahun 2006 dan 2007. Peningkatannya 3,16% dari tahun

³ Ibid

2007 dan 2,65% dari tahun 2006. Bahkan lebih besar 0,38% dari Kota Yogyakarta, yang inflasinya pada tahun 2006 dan 2007 justru lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelaahan penulis hal ini dipicu oleh gempa yang terjadi pada tahun 2006 di kabupaten ini.

Peningkatan inflasi yang cukup tajam pada tahun 2008, disebabkan oleh puncak pembangunan pasca gempa yang terjadi pada tahun tersebut. Banyaknya dana bantuan dari daerah-daerah lain yang masuk ke Kabupaten Bantul, mengakibatkan terjadinya peningkatan inflasi. Masyarakat sangat terbantu dengan bantuan tersebut, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan dana tambahan lagi.⁴

c. PDRB per kapita

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

Tabel 3.3

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bantul Tahun 2004-2008 Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000

No	Tahun	Harga Berlaku th. 2000		Harga Konstan th. 2000	
		Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2007	7.230.992	11,12	3.856.138	2,82
2	2008	8.081.485	13,10	3.971.446	3,29

Sumber : Informasi LPPD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 halaman 6

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2000 mengalami perubahan dari 11,12% pada tahun 2007 menjadi 13,00% pada tahun 2008. PDRB per kapita Kabupaten

⁴Ibid

Bantul atas dasar harga berlaku tahun 2000 untuk tahun 2007 sebesar Rp. 7.230.992.000,00 dan tahun 2008 mencapai Rp. 8.081.485.000,00. Berarti pertumbuhannya mengalami peningkatan sebesar 1,98% atau sebesar Rp. 850.493.000,00

PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2008 sebesar Rp. 3.971.446.000,00 . Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2007 yang mencapai Rp. 3.856.138.000,00 . Jika dilihat pada tabel pertumbuhannya mengalami peningkatan sebesar 0,47% atau sebesar Rp. 115.308.000,00.

d. Indeks Gini

Koefisien Gini Ratio merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Bantul. Koefisien Gini Ratio dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menganalisis pembangunan, khususnya di bidang ekonomi.

Tabel 3.4
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bantul Tahun 2004-2008

No	Tahun	Gini Ratio
1	2007	0,2474
2	2008	0,2538

Sumber: Informasi LPPD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 halaman 7

Indeks Gini pada tahun 2008 sebesar 0,2538, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indeks Gini tahun 2007 sebesar 0,2474

atau mengalami kenaikan sebesar 0,0064. Nilai koefisien Gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin kecil. Secara umum tingkat pemerataan baik pada tahun 2007 maupun tahun 2008 tergolong baik atau hanya mengalami tingkat ketimpangan rendah.

2. Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

1). Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Menengah dan Formal Tahun 2010. Persentase melek huruf di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 adalah sebesar 99,15%. Mengalami peningkatan sebesar 0,44% dari tahun 2007, yang mencapai 98,71%.⁵

Dalam kaitannya dengan buta huruf, pemerintah Kabupaten Bantul sangat berupaya keras dalam meningkatkan persentase melek huruf. Demi tercapainya pemberantasan buta huruf, hingga pencapaian melek huruf mencapai angka 100%.

Pemerintah Bantul berkomitmen untuk meraih Wajar tanpa pengecualian pada tahun 2012. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat kelompok belajar membaca dan menulis di desa-desa yang dipandu oleh istri kepala dusun

⁵ Sekilas Kabupaten Bantul, hal. 16

setempat. Kegiatan tersebut diikuti oleh penduduk usia dewasa (20 tahun ke atas) yang masih buta huruf.⁶

2). Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2008 adalah 8,55 tahun. Angka ini lebih lama 0,19 tahun dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah pada Tahun 2007 yakni 8,36 tahun.⁷

Semakin lama angka rata-rata lama sekolah, berarti pendidikan yang ditempuh semakin tinggi. Peningkatan yang terjadi tersebut, tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Pendidikan merupakan faktor terpenting, terutama dalam membangun mutu SDM yang terbaik.

3). Angka partisipasi murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

⁶ Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantul, Ir. Pulung Haryadi, MSc. Pada tanggal 02/11/2010 di Kantor Bappeda Bantul

⁷ Ibid

Tabel 3.5
APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2007	Tahun 2008
1	SD/ MI	90,71 %	91,27 %
2	SMP/ MTs	73,03 %	74,55 %
3	SLTA	57,11 %	58,30 %

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2008

Untuk tingkat yang lebih tinggi, perkembangan angka APM pada tahun 2007 dan 2008 hampir sama dengan APM SD, yakni 90,71 dan 91,27. Secara umum makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM nya. Hal ini dikarenakan anak-anak dalam batas usia sekolah masing-masing tingkat pendidikan sudah bersekolah di tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau mungkin juga belum bersekolah.

Perlu penelusuran lebih jauh lagi dari anak usia 7-12 tahun yang betul-betul belum bersekolah, dan inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi dinas teknis untuk mendorong mereka masuk ke bangku sekolah SD, lebih lanjut lagi dinas dan pemerintah daerah untuk lebih memberikan dorongan pada penduduk untuk sekolah lebih tinggi.

4). Angka partisipasi kasar

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100% karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda.

Tabel 3.6 APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul 2008

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki dan Perempuan (%)
1	SD/ MI	111,35	98,19	104,64
2	SMP/ MTs	99,14	93,42	96,22
3	SLTA	78,02	78,24	78,13

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2008

Menurut jenjang pendidikan, APK laki-laki pada jenjang pendidikan SD lebih besar daripada APK perempuan, masing-masing tercatat sebesar 111,35 dan 98,19. Ini berarti masih banyak terdapat anak-anak laki-laki di bawah/ diatas usia 7-12 tahun yang disekolahkan di tingkat SD, sedangkan perempuan meskipun kebanyakan masih di dalam batasan usia SD tetapi angka APK telah mendekati 100.

5). Angka pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ ijazah.

Persentase jumlah penduduk berdasarkan ijazah yang dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Ijazah Tertinggi
di Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Persentase
1	Tidak punya	25,09
2	SD/MI	23,59
3	SMP/MTs	17,45
4	SMU/MA	16,15
5	SMK	7,91
6	D1/D2	0,94
7	D3/Akademi	2,92
8	D4/S1	5,70
9	S2/S3	0,24
	Jumlah	100,00

Sumber: Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 halaman 76

Dari tabel diatas dapat diketahui sebesar 9,80% penduduk berpendidikan tinggi. Sedangkan ditingkat SMA/MA/Sederajat SMU/MA lebih diminati karena terdapat 16,15% penduduk yang berijazah SMU/MA dibandingkan dengan SMK yang hanya mencapai 7,91%.

Penduduk Kabupaten Bantul usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah adalah sebesar 74,91%. Sementara sisanya 25,09% penduduk tidak memiliki ijazah. Berarti dapat dikatakan bahwa 25,09% penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 tidak menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta, sehingga tidak mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.

Menurut pandangan penulis, hal ini dikarenakan pada tahun 2008, dulunya mereka tidak disekolahkan oleh orangtua

mereka karena alasan biaya. Sehingga pada saat sekarang mereka tidak dapat menunjukkan ijazah mereka.

b. Kesehatan

1). Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan, 2010. Pada Tahun 2008 Angka Kematian Bayi (AKB) adalah sebesar 13,23% terdapat 170 bayi yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. Meningkat dari Tahun 2007 yang AKB nya mencapai 9,19% terdapat 101 bayi meninggal di setiap 1000 kelahiran hidup.⁸

Sebagian besar kematian bayi dialami oleh para penduduk miskin. Masih tingginya angka kematian bayi, dikarenakan biaya pemeriksaan maupun harga obat di Rumah Sakit yang tidak bisa terjangkau oleh para warga miskin. Maka dari itu pemerintah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terus berupaya untuk meminimalisir kematian bayi.

Keselamatan ibu dan bayi sangatlah diperhatikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk penduduk miskin khususnya

⁸ Tabel Capaian Angka Kesehatan Tahun 2006-2009. Sekilas Kabupaten Bantul hal. 19

adalah dengan memberikan pelayanan pemeriksaan gratis di puskesmas dan juga pemberian tablet Fe gratis untuk para ibu hamil. Agar kesehatan bayi dan ibu dapat terjamin.⁹

2). Angka usia harapan hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tabel 3.8

Usia Harapan Hidup Tahun 2006-2008

No	Tahun	Usia Harapan Hidup
1	2006	70,9 tahun
2	2007	70,95 tahun
3	2008	71,11 tahun

Sumber : Sekilas Kabupaten Bantul 2010 halaman 19

Usia harapan hidup di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 adalah 71,11 tahun, setelah sebelumnya pada tahun 2007 angka usia harapan hidup sebesar 70,95 tahun.

Menurut pandangan penulis, hal ini dipicu oleh pola hidup penduduk lanjut usia yang kurang teratur. Dari hasil ini, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan melakukan tindakan real. Seperti senam lansia (senam bagi para penduduk lanjut usia).

⁹ Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantul, Ir. Pulung Haryadi, MSc. Pada tanggal 02/11/2010 di Kantor Bappeda Bantul

3). Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur.

Tabel 3.9
Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2006-2008

No	Tahun	Jumlah (balita)	Persentase
1	2006	441	0,85 %
2	2007	398	0,87 %
3	2008	229	0,39 %

Sumber : Sekilas Kabupaten Bantul 2010 halaman 19

Pada Tahun 2008 persentase balita gizi buruk mengalami penurunan, sebesar 0,48% atau sebanyak 169 balita. Tepatnya pencapaian pada tahun 2008 menjadi 0,39% atau sebanyak 229 balita yang mengalami gizi buruk.

Penurunan yang terjadi merupakan hasil kerja keras pemerintah dalam menggalakkan program-program asupan gizi kepada balita, yang dilakukan melalui petugas-petugas puskesmas dan posyandu di wilayah Kabupaten Bantul yang rutin dilakukan setiap satu bulan sekali.

c. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2008 adalah sebesar 18,54% atau sebanyak 196.509 penduduk yang berada pada garis kemiskinan. Berarti persentase penduduk

yang berada diatas garis kemiskinan adalah sebesar 81,46%. Pada Tahun 2007 persentase penduduk miskin sebesar 19,43% atau sebanyak 189.152 penduduk miskin. Jadi penduduk yang berada diatas garis kemiskinan adalah 80,57%.¹⁰

Dari data tersebut penulis dapat mengatakan bahwa masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul tidak begitu menjadi masalah yang krusial. Karena penduduk miskin persentasenya hanya sebesar 18,54% saja. Namun pemerataan ekonomi harus tetap berlanjut. Paling tidak menekan angka kemiskinan hingga dibawah angka 10%.

Masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul tetap menjadi prioritas pembangunan, maka dari itu untuk mengurangi beban orang miskin, pemerintah Kabupaten Bantul mengambil langkah-langkah tertentu. Diantaranya pemeriksaan gratis di Puskesmas dan adanya Banyankes (Bantuan Pelayanan Kesehatan). Selain itu dilakukan validasi data. Data orang miskin selalu di update. Kemudian beban orang miskin tersebut dikurangi dengan pengembangan ekonomi lokal, salah satunya larangan pendirian mall dengan tetap mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Jadi masyarakat tetap bisa melakukan transaksi jual beli di pasar, dengan harga beli yang lebih murah.¹¹

d. Kesempatan Kerja

Dalam indikator PP No. 6/2008. Kesempatan kerja lebih difokuskan pada rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini tabel jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bantul tahun 2008. -

¹⁰ DIY Dalam Angka, 2009 hal. 228

¹¹ Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantul, Ir. Pulung Haryadi, MSc. Pada tanggal 02/11/2010 di Kantor Bappeda Bantul

Tabel 3.10

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Kecamatan	Angkatan Kerja 2008	
		Bekerja 2008	Penganggur
1	Srandakan	16.019	1.131
2	Sanden	16.512	1.863
3	Kretek	17.387	2.000
4	Pundong	14.008	1.411
5	Bambanglipuro	24.266	1.816
6	Pandak	26.779	2.268
7	Bantul	30.466	2.807
8	Jetis	27.293	1.955
9	Imogiri	32.911	2.076
10	Dlingo	20.096	1.530
11	Pleret	17.585	2.501
12	Piyungan	16.902	1.517
13	Banguntapan	44.036	3.692
14	Sewon	50.585	1.257
15	Kasihan	38.156	2.739
16	Pajangan	19.928	1.389
17	Sedayu	17.842	3.413
	Jumlah	430.771	35.365

Sumber : Sekilas Kabupaten Bantul, 2010 halaman 14

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Total angkatan kerja di Kabupaten Bantul tahun 2008 adalah 466.136 orang. Dengan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2008 sebanyak 430.771. Jadi rasio penduduk yang bekerja adalah : $430.771/466.136 = 0,924$.

Jika ditampilkan dalam bentuk persentase. Persentase penduduk yang bekerja adalah sebesar 92%, sedangkan pengangguran hanya sebesar 8% saja atau sebanyak 35.365

orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etos kerja penduduk Kabupaten Bantul sangatlah tinggi.

Berarti dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja masih tinggi. Karena lebih dari 90% penduduk telah bekerja. Hal ini tentu saja, berkat Pemerintah Kabupaten Bantul yang terus mengupayakan penciptaan iklim investasi dan kemitraan/hubungan kerja dalam rangka membuka perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja serta penciptaan wirausaha baru seperti yang diprioritaskan dalam pembangunan.

e. Kriminalitas

Dalam indikator PP No. 6/2008. Kriminalitas lebih difokuskan pada angka kriminalitas yang tertangani yang merupakan penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Tabel 3.11
Banyaknya Perkara Kejaksaan yang Dapat Diselesaikan oleh Kejaksaan
Negeri Bantul menurut Jenis Perkara Pidana per Bulan, 2008

Bulan	Jenis Perkara Pidana									Jumlah
	Biasa	Ekonomi	Korupsi	Subversi	Narkotika	Imigrasi	Senpi-tajam	Uang Palsu	Lainnya	
1. Januari	16				1					17
2. Februari	36				1		1			38
3. Maret	26				6					32
4. April	24				2					26
5. Mei	22		1							23
6. Juni	40		1							41
7. Juli	27				1					28
8. Agustus	36				3					39
9. September	38				4					42
10. Oktober	27				2					29
11. November	30		1		2					33
12. Desember	17				2					19
Jumlah	339		3		24		1			367
2007	367		7		6		2			382

Sumber : Bantul Dalam Angka 2009 halaman 146-147

Dilihat dari banyaknya perkara kejaksaan yang dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bantul, maka angka kriminalitas yang tertangani pada Tahun 2008 adalah jumlah kasus dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk sehingga hasilnya :

$$367/856.206 \times 10.000 = 4,28$$

Sedangkan pada tahun 2007 : $382/831.657 \times 10.000 = 4,59$.

Hasilnya mengalami penurunan. Untuk itu kedepannya diharapkan para aparat penegak hukum lebih serius lagi dalam menangani pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

Pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum di lingkungan Kabupaten Bantul untuk meminimalisir tindak kriminal. Upaya yang dilakukan adalah terus meningkatkan patroli. Tentu saja juga dibantu masyarakat. Jadi jika ada pengaduan yang

masuk ke kepolisian dimasukkan ke kejaksaan untuk semaksimal mungkin dilakukan pemrosesan hingga penuntasan terhadap suatu kasus.¹²

Secara garis besar capaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat sangatlah baik. Karena hampir seluruh indikator mengalami peningkatan dari tahun 2007. Kecuali pada angka kriminalitas yang tertangani.

Berarti dapat dikatakan bahwa pada aspek ini, pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil dalam melaksanakan otonomi daerah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kegigihan instansi-instansi yang terkait dalam mengupayakan peningkatan di bidangnya. Seperti Dinas Kesehatan yang mampu meningkatkan angka usia harapan hidup sebesar 0,19 tahun, angka melek huruf sebesar 0,44% dan menekan persentase balita gizi buruk hingga 0,48%.

B. Aspek Pelayanan Umum

1. Pelayanan Dasar

a. Pendidikan Dasar

1). Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

¹² Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantul, Ir. Pulung Haryadi, MSc. Pada tanggal 02/11/2010 di Kantor Bappeda Bantul

Tabel 3.12
Angka Partisipasi Sekolah

No	Usia (tahun)	Tahun Ajaran	
		2006/2007	2007/2008
1	6-12	100,54%	102,60
2	13-15	89,63%	92,48%

Sumber : Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009

Berdasarkan tabel diatas. Pada Tahun Ajaran 2007/2008. Angka Partisipasi Sekolah (APS), penduduk usia 6-12 Tahun di Kabupaten Bantul adalah sebesar 102,60%. Angka ini meningkat dari Tahun ajaran sebelumnya yang mencapai angka 100,54%.

Dari kenaikan tersebut, penulis dapat mengartikan bahwa masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah pendidikan dasar baik yang lebih tua atau yang lebih muda menempuh pendidikan dasar pada tahun tersebut.

Demikian pula dengan APS pada usia 13-15 tahun. Mengalami peningkatan sebesar 2,85%. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 2,85 persen penduduk di luar batasan usia sekolah SMP/MTs/Sederajat baik yang lebih tua maupun lebih muda yang menempuh pendidikan tingkat SMP.

2). Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Berikut ini merupakan tabel banyaknya sekolah dan penduduk usia sekolah yang telah penulis olah dari data mentah ke dalam bentuk tabel.

Tabel 3.13

Banyaknya Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah, 2008¹³

No	Keterangan	SD	MI	Jumlah
1	Banyaknya Sekolah	346	26	372
2	Penduduk Usia Sekolah Dasar	-	-	64.044

Dari tabel diatas jumlah sekolah SD (Swasta dan Negeri) dan MI adalah sebanyak 372. Dimana Jumlah sekolah SD lebih banyak dijumpai di Kabupaten Bantul daripada MI. Yaitu sebesar 346 SD dan 26 MI. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Maka hasilnya adalah sebagai berikut : $372/64.044 \times 10.000 = 58,08$.

Dari hasil tersebut, maka penulis dapat mengatakan bahwa ketersediaan sekolah SD di Kabupaten Bantul sudah tergolong baik. Karena rasionya lebih dari 50%. Hasil ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyediakan fasilitas

¹³ Tabel dibuat berdasarkan data dari Bantul Dalam Angka, 2009 hal. 89, 99 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat hal. 63

pendidikan yang memadai. Agar penduduk usia pendidikan dasar dapat bersekolah di lingkungan yang kondusif. Sehingga banyak siswanya yang mendapatkan penghargaan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Selain itu sangat jarang dijumpai penduduk usia sekolah dasar yang tidak bersekolah di wilayah Kabupaten Bantul

3). Rasio guru/murid

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 3.14

Jumlah Guru dan Murid Pendidikan Dasar, 2008

No	Keterangan	SD	MI	Jumlah
1	Guru	5.139	348	5.487
2	Murid	71.001	2490	73.491

Sumber : Bantul Dalam Angka, 2009

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Berdasar data pada tabel diatas, maka hasilnya adalah sebagai berikut : $5.487/73.491 \times 1000 = 74,66$. Dengan kata lain terdapat 74 guru per 1000 murid. Jadi setiap guru hanya mengajar 13 murid saja.

Capaian yang luar biasa. Karena berdasar kurikulum yang berlaku, tidak akan efektif apabila satu orang guru mengajar lebih dari 35 murid. Hasil ini tak lain berkat kegigihan pemerintah

Kabupaten Bantul yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Untuk terus memprioritaskan pendidikan. Maka dari itu, tidakheran jika para siswa SD di Kabupaten Bantul sering mendapatkan penghargaan terkait dengan prestasi yang dicapai baik tingkat provinsi maupun nasional.

b. Pendidikan Menengah

1). Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

APS untuk usia 16-18 tahun, didapati sebesar 63,44% pada Tahun Ajaran 2007/2008 dan 62,05% pada Tahun Ajaran 2006/2007.

Tabel 3.15
APS Usia 16-18 tahun

No	Tahun Ajaran	APS
1	2006/2007	62,05%
2	2007/2008	63,44%

Sumber : Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009

Dari tabel diatas Angka Partisipasi Sekolah (APS) tidak sampai ke angka 100% walaupun mengalami peningkatan sebesar 1,39%. Hal ini merupakan hal yang wajar. Karena

semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin rendah nilai APS nya. Perlu penelusuran lebih jauh oleh dinas terkait. Angka ini lebih disebabkan karena masih terdapat anak-anak dalam batasan usia pendidikan menengah sudah menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau justru belum bersekolah.

2). Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Tabel 3.16

Jumlah Sekolah dan Usia Pendidikan Menengah, 2008¹⁴

No	Keterangan	SMA	SMK	MA	Jumlah
1	Sekolah	35	36	8	79
2	Usia Pendidikan Menengah				70.380

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Oleh karena itu, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah : $79/70.380 \times 10.000 = 11,22\%$. Angka ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan rasio ketersediaan sekolah di tingkat pendidikan dasar. Karena di Kabupaten Bantul, rata-rata hanya

¹⁴ Tabel dibuat berdasarkan data dari Bantul Dalam Angka, 2009 hal. 89, 99 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat hal. 63

terdapat 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 SMK dan 2 MA. Bahkan masih terdapat kecamatan yang hanya memiliki satu sekolah menengah, baik SMA, SMK maupun MA.

3). Rasio guru terhadap murid

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 3.17

Rasio Murid Terhadap Guru di Tingkat SMA+MA dan SMK Pada Tahun Ajaran 2007/2008

No	Pendidikan Menengah	Rasio
1	SMA+MA	8
2	SMK	8

Sumber : Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009, hal. 109

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa terdapat satu guru yang mengajar setiap 8 murid. Berarti ketersediaan guru bagi para murid pendidikan menengah sangatlah memadai. Dengan begini mutu pengajaran pun akan terlaksana dengan baik.

c. Kesehatan

1). Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Pada tahun 2008 jumlah posyandu di wilayah Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 1.113 sementara jumlah balitanya sebanyak 6,99% dari total penduduk sebanyak 856.206 jiwa. Maka dari itu didapat jumlah balita sebanyak 59.848 balita. Sehingga berdasar data tersebut rasio posyandu per satuan balita adalah : $1.113/59.848 \times 1000 = 18,59\%$.

Di Kabupaten Bantul, posyandu terdapat di setiap pedukuhan. Angka 18,59% tersebut penulis telah cukup untuk memenuhi kebutuhan keseimbangan antara jumlah balita dengan posyandu di tahun tersebut.

Kegiatan posyandu di Kabupaten Bantul rutin dilakukan setiap satu bulan sekali. Dengan demikian pemerintah melalui petugas-petugas posyandu dapat mengetahui lebih dini penderita yang mengalami permasalahan kurang berat badan. Sehingga dapat tertangani dengan cepat dan penderita balita gizi buruk pun tidak akan ada lagi.

2). Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Berikut ini merupakan tabel jumlah puskesmas induk, puskesmas pembantu dan balai pengobatan di Kabupaten Bantul tahun 2008.

Tabel 3.18
Jumlah Puskesmas, Pustu dan Balai Pengobatan
(Poliklinik) di Kabupaten Bantul, 2008

No	Jenis	Jumlah
1	Puskesmas Induk	27
2	Puskesmas Pembantu	67
3	Poliklinik	66
Total puskesmas, pustu, poliklinik		160

Sumber : Sekilas Kabupaten Bantul, 2010 halaman 17

Dari tabel terdapat 27 puskesmas, 67 pustu dan 66 poliklinik (balai pengobatan). Sehingga bila dijumlahkan sebanyak 160. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu terhadap penduduk adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk.

Rasio puskesmas : $27/856.206 \times 1000 = 0,03$. Rasio puskesmas pembantu : $67/856.206 \times 1000 = 0,078$. Rasio poliklinik : $66/856.206 \times 1000 = 0,077$. Sedangkan rasio puskesmas, pustu, poliklinik per 1000 penduduk adalah : $160/856.206 \times 1000 = 0,18$.

Penulis dapat mengatakan bahwa perbandingannya masih terbilang minim. Bahkan belum tentu terdapat satu puskesmas, pustu ataupun poliklinik di setiap 1000 penduduk. Menurut penulis, hal ini bisa dipicu oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Sementara jumlah puskesmas, pustu dan yang lainnya tidak bertambah dari tahun 2007.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah terus meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan. Misalnya dengan menambah jumlah puskesmas di setiap kecamatan. Karena berdasar pengamatan penulis, kebanyakan kecamatan di Kabupaten Bantul hanya memiliki satu puskesmas. Dengan satu puskesmas di setiap desa. Padahal untuk memenuhi porsi agar sesuai kebutuhan penduduk, setidaknya terdapat sedikitnya 3 puskesmas di setiap kecamatan. Namun di Kabupaten Bantul baru Kecamatan Banguntapan saja yang memiliki 3 puskesmas. Maka dari itu pemerintah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan perlu melakukan tindakan tersebut.

3). Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Berikut ini merupakan tabel jumlah Rumah Sakit Umum Negeri dan Swasta Di Kabupaten Bantul tahun 2008.

Tabel 3.19
Jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bantul, 2008

No	Jenis RSU	Jumlah
1	Negeri	1
2	Swasta	9
Jumlah		10

Sumber : Bantul Dalam Angka 2009, halaman 108

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah

penduduk. Jadi rasio rumah sakit di Kabupaten Bantul tahun 2008 adalah : $10/856.206 \times 1000 = 0,011$.

Satu Rumah Sakit Umum Negeri tersebut terletak di Kecamatan Bantul, yakni RSUD Panembahan Senopati. Sedangkan di Kecamatan Bambanglipuro, Pleret dan Banguntapan masing-masing terdapat satu RSU swasta. Di Kecamatan Bantul, Jetis dan Sewon masing-masing terdapat 2 RSU swasta. Sementara 10 kecamatan lainnya belum terdapat Rumah Sakit Umum.

Masih minimnya jumlah RSU membuat pemerintah Kabupaten Bantul terus meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta. Perihal pendirian RSU di wilayah Kabupaten Bantul. Seperti yang belum lama didirikan oleh pihak swasta adalah RSU di wilayah perbatasan Kecamatan Jetis dan Pundong.

4). Rasio dokter per satuan penduduk

Berikut ini merupakan tabel jumlah dokter di Kabupaten Bantul Tahun 2008.

Tabel 3.20
Jumlah Dokter di Kabupaten Bantul, 2008

No	Jenis	Jumlah
1	Dokter Spesialis	21
2	Dokter Umum	94
3	Dokter Gigi	61
Total		176

Sumber : Sekilas Kabupaten Bantul, 2010

Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Dengan demikian rasio dokter nya adalah : $176/856.206 \times 1000 = 0,20$.

Jumlah dokter masih terbilang sedikit. Hanya 0,20 per 1.000 penduduk. Penulis dapat mengatakan bahwa ini masih jauh di bawah cukup. Karena dengan angka itu berarti belum tentu dijumpai satu orang dokter dalam 1000 jumlah penduduk.

Padahal perguruan-perguruan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul dan sekitarnya seperti UGM, UNS dan UMY sering mencetak lulusan-lulusan dokter yang professional. Melalui ini, sebenarnya pemerintah Kabupaten Bantul dapat melakukan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi tersebut. Agar mereka mau mengabdikan diri di Kabupaten Bantul, misalnya dengan membuka praktek dokter secara bergiliran sesuai dengan sistem kontrak yang telah disepakati.

5). Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Berikut ini merupakan tabel jumlah tenaga medis di Kabupaten Bantul baik perawatan maupun non perawatan.

Tabel 3.21
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Bantul, 2008

No	Jenis	Jumlah
1	Apoteker	9
2	Bidan	256
3	Perawat	319
4	Farmasi	36
5	Gizi	39
6	Teknis Medis	75
7	Sanitasi	54
8	Kesmas	33
	Total	821

Sumber : Sekilas Kabupaten Bantul, 2010

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Sehingga pada tahun 2008, didapat rasionya sebagai berikut :

$$821/856.206 \times 1000 = 0,95.$$

Rasionya hampir mendekati angka satu. Namun dari hasil itu, berarti satu tenaga medis tetap belum bisa mewakili 1 000 orang penduduk. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bantul terus menambah jumlah tenaga medis. Seperti formasi yang dilakukan pada CPNS Daerah. Dimana formasi tenaga medis, seperti perawat, bidan ataupun gizi lebih tinggi dibanding tenaga teknis non kesehatan lainnya.

d. Lingkungan hidup

1). Persentase Penanganan Sampah

Persentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah yang ditangani terhadap volume produksi sampah.

Produksi sampah/timbunan sampah di Kabupaten Bantul mencapai 1.796,33 m³/hari dengan asumsi bahwa produksi sampah per orang per hari sebesar 2,3 liter. Cakupan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas PU) baru mencapai 6,23% atau 112 m³/hari.¹⁵ Sehingga persentasenya hanya mencapai 16,04%.

Menurut penulis hal ini lebih dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai dalam melakukan penanganan terhadap sampah. Karena sebenarnya tidak semua sampah itu tidak berguna. Tergantung bagaimana kemampuan untuk mengelolanya.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan membuat pilot proyek pengolahan sampah menjadi sumber energi (briket bio arang) di wilayah Kecamatan Bambanglipuro, pengolahan sampah menjadi pupuk organik di wilayah Kecamatan Bantul (di Pasar Bantul dan di Dusun Serut Bantul). Ke depan akan dikembangkan di semua pasar di wilayah Kabupaten Bantul.

¹⁵ Lampiran L.KPJ Bappeda Bantul 2008 hal. 1-31. Diakses melalui bappedabantul.go.id pada tanggal 17/05/2010

Di samping itu dalam rangka untuk mencetak tenaga terampil di bidang pengolahan sampah dan limbah menjadi energi alternatif terbaharukan maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro untuk membuka jurusan pengolahan sampah/limbah menjadi sumber energi alternatif terbaharukan. Kegiatan ini telah mendapat dukungan dari Program Magister Sistem Teknik UGM yang akan memberikan bantuan tenaga pendidik, teknologi, dan sarana untuk kegiatan praktek.

2). Presentase penduduk berakses air minum

Berdasarkan sumber air minum yang digunakan, sekitar 64,02% Rumah Tangga telah menggunakan sumber air minum sumur terlindung, diikuti oleh sumber air minum dalam kemasan, ledeng dan sumur pompa sebesar 28,43%. Sisanya sumber air minum tak terlindung, mata air, air hujan dan lainnya dengan persentase kurang dari 10%.¹⁶ sebagian besar penduduk berakses air minum dari sumur terlindung, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Bantul yang didominasi wilayah pedesaan memiliki sumur sendiri, yang digunakan untuk keperluan sehari-hari mereka, termasuk sebagai sumber air minum.

¹⁶ Indikator Kesejahteraan Rakyat, hal. 61

e. Sarana dan Prasarana Umum

1). Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Berikut ini merupakan panjang jalan kabupaten menurut jenis kondisi jalan.

Tabel 3.22

Panjang Jalan Kabupaten Bantul menurut Jenis Kondisi Jalan (Km)

No	Kondisi Jalan	2006	2007	2008
1	Baik	341,23	362,95	327,61
2	Sedang	284,00	272,90	317,87
3	Rusak	223,15	214,45	209,65
4	Rusak Berat	51,45	49,53	44,70
	Jumlah	899,83	899,83	899,83

Sumber : Bantul Dalam Angka, 2009 halaman 279

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Panjang jalan yang berkondisi baik pada tahun 2008 adalah 327,61 km dari jumlah seluruh panjang jalan 899,83 km. Berarti proporsi panjang jaringan jalannya adalah : $327,61 \text{ km} / 899,83 \text{ km} = 0,36$.

Sedangkan pada tahun 2007 panjang jalan dengan kondisi baik sepanjang 362,95 km. Hal ini berarti proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah : $362,95 \text{ km} / 899,83 \text{ km} = 0,40$. Jadi proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan dengan pada tahun 2007.

Menurut penulis penurunan tersebut dikarenakan faktor penggunaan jalan. Tak jarang penulis jumpai banyak jalan yang rusak akibat akar pohon-pohon di pinggir jalan yang semakin besar. Dalam hal ini penulis menghimbau agar pepohonan yang ditanam di pinggir jalan kabupaten adalah pohon-pohon yang ringan atau tidak berakar tunggang.

Jadi dapat dikatakan bahwa penurunan tersebut bukan merupakan alasan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul tidak serius dalam menangani masalah sarana dan prasarana publik, seperti jalan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Bantul :

Perbaikan sarana dan prasarana publik, terus dilakukan salah satunya adalah jalan. Hal ini dilakukan demi melakukan optimalisasi terhadap pelayanan umum agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Kondisi kualitas jalan yang memadai akan memperlancar arus transportasi yang berdampak pada sektor perekonomian yang semakin berkembang.¹⁷

2). Rasio jaringan irigasi

Panjang saluran primer adalah 64.611 m, saluran sekunder 137.214 m dan saluran pembuangnya (Afvour) sepanjang 195,88 km.¹⁸ Berarti total panjang saluran irigasi adalah 196,0236 km. Sedangkan untuk luas lahan pertaniannya. Berdasar klasifikasi lahan, luas lahan di Kabupaten Bantul

¹⁷ Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantul, Ir. Pulung Haryadi, MSc. Pada tanggal 02/11/2010 di Kantor Bappeda Bantul

¹⁸ Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 hal. 81

tahun 2008 adalah 50.685 ha¹⁹. Rasio jaringan irigasi di tahun 2008 adalah $196,0236 \text{ km}/50.685 \text{ ha} = 0.003867$.

Rasio yang sedikit tersebut dikarenakan jaringan irigasi digunakan untuk seluruh lahan pertanian, yang terdiri dari sawah irigasi, tadah hujan dan lahan kering. Pada tahun 2008 telah terjadi alih fungsi lahan, dari tanah pertanian menjadi permukiman atau menjadi tempat usaha, hal tersebut berdasarkan analisis ijin pengeringan selama tahun 2008.

Dengan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian tersebut, pemerintah harus melakukan perhatian yang khusus, karena dimungkinkan akan adanya penyusutan dalam hal hasil panen.

3). Rasio tempat ibadah penduduk

Banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Bantul pada Tahun 2008 adalah sebanyak 3.315 buah (lihat tabel 2.7) dengan jumlah penduduk Tahun 2008 sebesar 856.206 jiwa. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1.000 jumlah penduduk.

Berarti rasio ketersediaan tempat ibadah bagi penduduk yaitu : $3.315/856.206 \times 1.000 = 3,87$. Pada tahun 2007 : $3200/831.657 \times 1.000 = 3,84$. Dengan demikian sarana tempat

¹⁹ Ibid hal. 69

ibadah di wilayah Kabupaten Bantul bisa terbilang kurang memadai, Walaupun jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,46%. Pada tahun 2008 sebanyak 3.315 sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 3.200 tempat ibadah.

Dilihat dari aspek kapasitas penggunaannya, jumlahnya masih minim. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Bantul lebih meningkatkan pembangunan sarana prasarana tempat ibadah.

f. Penataan ruang

1). Ruang terbuka hijau

Berikut ini merupakan lokasi dan luas ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Bantul. Yang dari tabel dapat dilihat wilayah terluas merupakan hutan kota pasar Gabusan yang terdapat di Kecamatan Sewon, dengan luas 4 Ha.

Tabel 3.23

Lokasi Dan Luas Ruang Terbuka Hijau Tahun 2008

No	Lokasi	Luas	Jenis Tanaman Dominan
1	Hutan Kota Bantul (Komplek Dwiwindu/Masjid Manunggal Bantul)	2 Ha	Asam Kranji, Jati, Beringin dan Angsana
2	Sebelah Timur Kantor Pegadaian dan Komplek Parkir Pemda Bantul	0,8 Ha	Minyak Kayu Putih, Sonokeling, Ketepeng, Bida Cantik
3	Hutan Kota Pasar Gabusan, Timbulharjo Sewon	4 Ha	Talok, Ketepeng dan Clereside

Sumber: Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 halaman 202

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul disediakan untuk menjaga kelestarian alam. Masyarakat Kabupaten Bantul dapat ikut menikmatinya karena dibuka untuk umum. Kawasan terbuka hijau juga dimaksudkan untuk mengurangi polusi udara yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan yang melintas di wilayah Bantul atau polusi yang dikeluarkan oleh limbah dari pabrik yang berupa asap tercemar.

g. Perhubungan

1). Jumlah uji kir angkutan umum (selama satu tahun)

Uji kir kendaraan sangat dibutuhkan di Kabupaten Bantul, Pada Tahun 2008 jumlah tersebut mencapai 258.331, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 240.516.

Tabel 3.24

Banyaknya Angkutan/ Kendaraan Umum dan Bukan Umum yang Layak Uji Menurut Jenis Kendaraan, 2008

No	Jenis Kendaraan	Bukan Umum	Umum
1	Mobil Penumpang	4	27
2	Mobil Bus	36	350
3	Mobil Barang		
	a. Pick Up	3320	
	b. Truk	1873	16
	c. Tanki	10	
4	Kereta Gandengan	8	2
5	Taksi		100
	Jumlah	5251	495
	2007	7271	688

Sumber : Bantul Dalam Angka, 2009 halaman 282

Untuk kendaraan umum yang layak uji Tahun 2008 mengalami penurunan sebanyak 193 kendaraan. Hal ini dimungkinkan karena mesin kendaraan yang dari tahun ke tahun semakin tua, atau para pemilik kendaraan yang kurang memperhatikan perawatannya. Akibatnya kendaraan menjadi tidak layak uji. Adanya uji kendaran umum ini, dimaksudkan untuk mengurangi polusi udara akibat asap, dan menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan masalah mesin kendaraan.

2). Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

Di Kabupaten Bantul tidak dijumpai adanya pelabuhan udara ataupun pelabuhan laut. Pelabuhan udara hanya terdapat di Kabupaten Sleman. Sementara di Kabupaten Bantul terdapat 6 terminal. Berikut ini merupakan data terminal pada tahun 2008.

Tabel 3.25 Data Terminal Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Tipe Terminal	Nama Terminal	Letak
1	Tipe B	Palbapang	Palbapang
2		Gabusan	Gabusan
3		Imogiri	Imogiri
4		Sedayu	Sedayu
5		Piyungan	Piyungan
6		Pasar Bantul	Pasar Bantul

Sumber: Database Profil Daerah Kabupaten Bantul, 2009 halaman 128

Terminal-terminal tersebut digunakan oleh masyarakat Kabupaten Bantul sebagai sarana untuk melancarkan aktivitas keseharian mereka, seperti berdagang, sekolah, berangkat bekerja ataupun dengan tujuan ke daerah lain. Khususnya masyarakat yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Untuk itu selalu diharapkan perbaikan dan perlindungan terhadap sarana-sarana umum, seperti halnya terminal. Karena sangat dibutuhkan masyarakat.

2. Pelayanan Penunjang

a. Penanaman modal

1). Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun. Pada Tahun 2008 ada 6 perusahaan dengan 1.362 tenaga kerja (baik WNI/WNA) yang bekerjasama dengan sejumlah investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bantul. Para investor tersebut datang dari negeri sendiri dan ada beberapa investor asing, seperti dari Inggris, Korea Selatan, Prancis, Turki, Austria, Singapura, Australia dan Amerika.

Banyak investor dalam negeri maupun investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Berikut wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Bantul

terkait dengan ketertarikan mereka untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul :

Ada beberapa alasan utama yang membuat para investor suka menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul, yaitu karena mudahnya perijinan, pelayanan yang cukup memadai dan iklim berinvestasi yang kondusif.²⁰

2). Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi merujuk pada besaran rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Investasi PMA yang berada di wilayah Kabupaten Bantul diantaranya bergerak pada jenis kegiatan jasa perdagangan, mebel, tekstil, bamboo, rotan, jasa wisata, kerajinan dan kulit. Investasi terbesar di Kabupaten Bantul adalah di bidang jasa dengan nilai investasi sebesar 650 \$ US.²¹

Sedangkan investasi PMA selama tahun 2007 tercatat sebanyak 33 buah dengan total investasi Rp. 19.735.982,- dan US\$ sebesar 3.390.290 yang diantaranya bergerak pada jenis kegiatan jasa perdagangan, mebel, tekstil, bamboo, rotan, jasa wisata, kerajinan dan kulit. Keseluruhan jenis kegiatan tersebut mampu

²⁰ Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantul, Ir. Pulung Haryadi, MSc. Pada tanggal 02/11/2010 di Kantor Bappeda Bantul

²¹ Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009, Bappeda Bantul halaman 54

menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 2.790 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 49 orang.²²

3). Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/ PMDN terhadap jumlah seluruh PMDN dan PMA. Penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN pada Tahun 2008 adalah sebanyak 1.362 dengan jumlah seluruh PMA/PMDN sebanyak 6 perusahaan. Maka dari itu rasio daya serap tenaga kerjanya adalah : $1.362/6 = 227$. Sedangkan di tahun 2007, jumlah tenaga kerja sebanyak 2.839 dan jumlah perusahaannya sebanyak 33. Jadi rasionya adalah : $2.839/33 = 86$

Pada tahun 2008, satu perusahaan menampung 227 pekerja. Hal ini mengalami peningkatan, karena pada tahun 2007 satu perusahaan hanya mampu menyerap 86 orang saja. Dengan demikian penulis dapat mengatakan bahwa dari tahun ke tahun penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan baik asing maupun dalam negeri yang menanamkan investasi di Kabupaten Bantul semakin bertambah.

²² Laporan Database Profil Daerah Kabupaten Bantul 2008, Bappeda Bantul halaman 181

b. KUKM

1). Persentase koperasi aktif

Berikut ini merupakan tabel jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.26 Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Anggotanya Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul, 2008

No	Jenis Koperasi	Aktif	Pasif	Jumlah
1	Kop. Nelayan	-	3	3
2	Kop. Pemuda	-	1	1
3	Kop. Perikanan	1	1	2
4	Kop. Peternakan	1	2	3
5	Kop. Sekunder	3	-	3
6	Kop. Wisata	1	1	2
7	Kop. Angkutan	4	1	5
8	Kop. Karyawan	16	15	31
9	Kop. Mahasiswa	1	2	3
10	Kop. Pasar	-	-	-
11	Kopinkra	8	1	9
12	Kopontren	6	15	21
13	Kop. Petani	15	23	38
14	Kop. Wanita	22	1	23
15	KPRI	47	1	48
16	Kop. Simpan Pinjam	46	6	56
17	Kop. Serba Usaha	78	26	104
18	KUD	17	-	17
19	Prim Kopabri	5	1	6
20	Prim Koppad	1	-	1
21	Prim Koppol	1	-	1
22	Prim Koveri	2	-	2
23	Kopti	1	-	1
24	Kop. Wredatama	2	-	2
	Jumlah	278	100	378
	2007	256	65	321

Sumber : Bantul Dalam Angka, 2009 halaman 316

Persentase koperasi aktif adalah proporsi jumlah koperasi aktif terhadap jumlah seluruh koperasi. Jadi persentase koperasi aktif pada tahun 2008 adalah : $278/378 \times 100\% = 73,54\%$. Sedangkan pada tahun 2007 adalah : $256/321 \times 100\% = 79,75\%$.

Terjadi penurunan sebesar 6,21%. Penurunan ini, menurut penulis lebih dikarenakan faktor kepengurusan. Pengurus koperasi yang kurang aktif juga berpengaruh pada kurang aktifnya koperasi tersebut. Sehingga koperasi tersebut pada akhirnya pasif. Maka dari itu dibutuhkan sistem kepengurusan yang memiliki prinsip kuat dalam pengelolaan koperasi. Misalnya yang dijadikan ketua koperasi tidak hanya yang berwawasan luas, namun justru orang yang aktif di setiap kegiatan yang berkaitan dengan koperasi yang diikutinya.

2). Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Jumlah UKM non BPR/ LKM dihitung berdasarkan jumlah yang aktif. Terdapat sebanyak 17.937 unit industri kecil menengah di Kabupaten Bantul pada tahun 2008. Mengalami peningkatan setelah sebelumnya hanya terdapat 17.911 unit di Tahun 2007.²³ Meningkat 0,14%.

²³ Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 hal. 233

Tabel 3.27

Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kabupaten Bantul

No	Sektor	Tahun 2008
1	Industri Kecil	
	Unit Usaha (UU)	17.937
	Tenaga Kerja (Orang)	80.468
2	Industri menengah	
	Unit Usaha (UU)	10
	Tenaga Kerja (Orang)	102
3	Industri Besar	
	Unit Usaha (UU)	8
	Tenaga Kerja (Orang)	978

Sumber : *Sekilas Kabupaten Bantul, 2010 halaman 28*

Sedangkan dari data di atas terdapat 17.955 unit usaha dari sektor industri. Didominasi oleh sektor industri kecil sebanyak 17.937 dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak, yakni 80.468 orang. Berdasarkan catatan Disperindagkop, nilai investasinya juga yang terbesar. Untuk itu diharapkan pemerintah semakin memperhatikan keberadaan sektor industri kecil dan menengah. Karena sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja, sehingga penduduk yang menganggur dapat memiliki pekerjaan dan beban orang miskin pun ikut berkurang.

3). Jumlah BPR/LKM

Jumlah BPR/ LKM dihitung berdasarkan jumlah yang aktif. Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk mengetahui fasilitas perkreditan yang diberikan pada usaha kecil menengah.

Fasilitas perkreditan ini mencakup keberadaan dari jumlah koperasi aktif, jumlah UKM non BPR/ LKM serta jumlah BPR/ LKM.

Pada Tahun 2008 terdapat sebanyak 39 BPR yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul. Berikut ini merupakan tabel persebaran BPR di wilayah Kabupaten Bantul.

Tabel 3.28
Jumlah BPR di Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah
1	Srandakan	2
2	Sanden	1
3	Kretek	1
4	Pundong	1
5	Bambanglipuro	2
6	Pandak	1
7	Bantul	3
8	Jetis	1
9	Imogiri	2
10	Dlingo	1
11	Pleret	1
12	Piyungan	3
13	Banguntapan	7
14	Sewon	5
15	Kasih	6
16	Pajangan	1
17	Sedayu	1
	Jumlah	39

Sumber : Database Profil Daerah Kabupaten Bantul, 2009 halaman 153

Terdapat 39 BPR di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul, dimana paling banyak ditemui di Kecamatan Banguntapan. Mengingat UKM membantu dalam penyerapan tenaga kerja, maka dari itu BPR penting untuk memberikan kredit kepada UKM agar

terhindar dari pasang surut. Jadi penulis menginisiasikan, setidaknya terdapat 3 BPR di satu kecamatan.

c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1). Rasio KDRT

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Perlu akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berikut merupakan tabel data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul Tahun 2008.

Tabel 3.29
Data Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2008

No	Korban Menurut	Jumlah Korban Orang
1	Jenis Kelamin	1
2	Kelompok Umur	1
3	Tingkat Pendidikan	1
4	Jenis Pekerjaan	1
	Jumlah	4

Sumber: Database Profil Daerah Kabupaten Bantul, 2009 halaman 198

Dari tabel diatas terlihat, bahwa hanya terdapat 4 tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak selama satu tahun (pada tahun 2008). Hal ini berarti tidak banyak KDRT yang terjadi pada

tahun tersebut dengan rasio sebesar 0,0175. Jadi penulis dapat mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 sudah baik. Meskipun demikian, kontrol dan pengawasan tetap perlu dilakukan, khususnya oleh Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan KB. Yang dapat melakukan kerjasama dengan LSM perempuan dan anak.

d. KB dan KS

1). Rasio akseptor KB

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pasangan usia subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Pada tahun 2008 terdapat terdapat 148.807 pasangan usia subur (PUS) dan 144.359 PUS pada tahun 2007²⁴

Tabel 3.30
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi

No	Metode Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB Aktif
1	IUD	26.336
2	MOP	789
3	MOW	5.910
4	IMP	5.053
5	Suntik	57.525
6	PIL	12.753
7	Kondom	5.229
8	OV	
	Jumlah	113.595
	2007	111.637

Sumber : Bantul Dalam Angka, 2009 halaman 178-179

²⁴ Bantul Dalam Angka, 2009 hal. 179

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Sehingga rasio akseptor KB pada Tahun 2008 adalah : $113.595 / 148.807 \times 1.000 = 763,37$. Atau 76,33%

Sedangkan pada tahun 2007 rasionya adalah : $111.637 / 144.359 \times 1.000 = 773,32$. Atau 77,33%. Dari hasil di atas berarti persentasenya mengalami penurunan sebesar 1%. Menurut penulis penurunan ini dikarenakan pada tahun 2008 masih terdapat beberapa pasangan usia subur yang baru saja menikah, dan belum ikut serta sebagai akseptor KB aktif.

Namun rasionya sudah cukup baik. Penulis dapat menyimpulkan bahwa telah banyak pasangan menikah yang memahami arti penting KB demi terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga.

e. Komunikasi dan informatika

1). Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner.

Sarana komunikasi merupakan hal penting yang sangat menunjang di berbagai sektor. Penyediaan sarana komunikasi sangat berkaitan dengan perkembangan kemajuan suatu

wilayah serta sejalan dengan kemajuan pembangunan dibidang perekonomian.

Tabel 3.31
Jumlah Sinyal Telepon Genggam Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Kecamatan	Kuat	Lemah	Tidak ada Sinyal	Jumlah
1	Srandakan	2	-	-	2
2	Sanden	4	-	-	4
3	Kretek	5	-	-	5
4	Pundong	3	-	-	3
5	Bambanglipuro	3	-	-	3
6	Pandak	4	-	-	4
7	Bantul	5	-	-	5
8	Jetis	4	-	-	4
9	Imogiri	7	1	-	8
10	Dlingo	6	-	-	6
11	Pleret	5	-	-	5
12	Piyungan	3	-	-	3
13	Banguntapan	7	1	-	8
14	Sewon	4	-	-	4
15	Kasih	4	-	-	4
16	Pajangan	3	-	-	3
17	Sedayu	4	-	-	4
	Jumlah	73	2	-	75

Sumber : Statistik Potensi Desa halaman 56

Berdasar tabel terdapat 73 sinyal (jaringan) kuat, dimana paling banyak terdapat di 2 kecamatan, yakni Imogiri dan Banguntapan. Dengan letak yang sama terdapat pula masing-masing satu desa yang bersinyal lemah. Namun semua kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul tahun 2008 telah terjangkau sinyal.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa sarana komunikasi di Kabupaten Bantul sudah baik. Mengingat

pentingnya sarana komunikasi bagi warga, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dan secepatnya dilakukan perbaikan terhadap 2 desa yang masih memiliki sinyal lemah.

2). Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/ TV adalah banyaknya penyiaran radio/ TV nasional maupun lokal yang masuk ke daerah. Berikut ini merupakan tabel banyaknya desa yang dapat mengakses program televisi.

Tabel 3.32
Banyaknya Desa Menurut Program Televisi

No	Kecamatan	Program TV			
		TVRI	Swasta Nasional	Luar Negeri	Lokal
1	Srandakan	2	2		2
2	Sanden	4	4		4
3	Kretak	5	5		5
4	Pundong	3	3		3
5	Bambanglipuro	3	3		3
6	Pandak	4	4		4
7	Bantul	5	5		5
8	Jetis	4	4		4
9	Imogiri	8	8		8
10	Dlingo	6	6		6
11	Pleret	5	5		5
12	Piyungan	3	3		3
13	Banguntapan	8	8		8
14	Sewon	4	4	1	4
15	Kasih	4	4		4
16	Pajangan	3	3		3
17	Sedayu	4	4		4
	Jumlah	75	75	1	75

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Bantul Tahun 2008 halaman 55

Sudah semua desa atau 75 desa di wilayah Kabupaten Bantul yang terjangkau saluran program televisi yaitu TVRI,

televisi swasta nasional dan lokal. Untuk program televisi luar negeri hanya satu desa di Kecamatan Sewon yang dapat menjangkaunya. Ini berarti desa-desa di wilayah Bantul sudah mendapatkan sarana komunikasi yang baik dengan tersedianya jaringan televisi yang bisa diakses sampai ke seluruh desa.

f. Pemberdayaan masyarakat dan desa

1). Jumlah LSM

Terdapat 19 LSM aktif dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2008.

Tabel 3.33
Jumlah LSM per Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah
1	Srandakan	-
2	Sanden	2
3	Kretek	-
4	Pundong	-
5	Bambanglipuro	2
6	Pandak	-
7	Bantul	1
8	Jetis	-
9	Imogiri	-
10	Dlingo	-
11	Pleret	1
12	Piyungan	-
13	Banguntapan	3
14	Sewon	4
15	Kasih	3
16	Pajangan	-
17	Sedayu	3
	Jumlah	19

Sumber : Statistik Potensi Desa halaman 51

Tidak setiap kecamatan terdapat LSM. Padahal keberadaan LSM sangat membantu pemerintah dalam melakukan

pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri. Untuk itu penulis, mengharapkan setidaknya terdapat satu LSM di setiap kecamatan, terutama yang bergerak di bidang pertanian dan mitigasi bencana.

g. Perpustakaan

1). Jumlah perpustakaan

Pada tahun 2007 jumlah perpustakaan sebanyak 644, sedangkan tahun 2008 647. Berarti mengalami peningkatan sebesar 0,46%. Berikut ini merupakan tabel jumlah perpustakaan menurut jenisnya.

Tabel 3.34

Banyaknya Perpustakaan menurut Jenisnya per Kecamatan Tahun 2008

No	Kecamatan	Jenis Perpustakaan						Jumlah
		Desa	Umum	SD	SLTP	SLTA	PT	
1	Srandakan	2	1	16	3	2	-	24
2	Sanden	4	1	16	3	2	-	26
3	Kretek	5	1	13	3	3	-	25
4	Pundong	3	3	20	3	2	-	31
5	Bambanglipuro	3	1	19	5	4	-	32
6	Pandak	4	3	24	5	2	-	38
7	Bantul	5	5	24	8	14	3	59
8	Jetis	4	1	22	4	1	-	32
9	Imogiri	8	1	25	5	5	-	44
10	Dlingo	6	1	26	7	3	-	43
11	Pleret	5	1	20	4	4	-	34
12	Piyungan	3	1	19	4	7	-	34
13	Banguntapan	8	1	28	6	5	4	52
14	Sewon	4	3	28	5	7	7	54
15	Kasih	4	1	34	8	4	5	56
16	Pajangan	3	3	16	3	1	-	26
17	Sedayu	4	1	22	3	6	1	37
	Jumlah	75	29	372	79	72	20	647
	2007	75	23	372	80	74	20	644

Sumber : Bantul Dalam Angka, 2009 halaman 170

Dari tabel terlihat bahwa jenis perpustakaan SLTP dan SLTA saja yang bertambah. Sementara jenis perpustakaan didominasi oleh perpustakaan SD, hal ini karena minat baca dan rasa ingin tahun anak-anak SD masih tinggi.

Dalam hal ini, penulis berpendapat sebaiknya perpustakaan keliling tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak SD, namun perlu adanya perpustakaan umum keliling. Agar masyarakat meningkatkan kecintaan mereka terhadap membaca, mengingat buku yang merupakan guru bisu yang cerdas bagi mereka. Bahwa dengan membaca, pengetahuan kita akan semakin tinggi.

2). Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menurut profesi pengunjung di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 sebesar 29.472 orang. Jumlah ini mengalami penurunan setelah sebelumnya pada tahun 2007 jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul mencapai 32.639 orang. Berarti penurunan sebanyak 3167 pengunjung atau sebesar 9,7%. Berikut ini merupakan tabel banyaknya pengunjung perpustakaan umum Kabupaten Bantul tahun 2008.

Tabel 3.35
Banyaknya Pengunjung Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul menurut
Profesi Pengunjung per Bulan, 2008

No	Bulan	Profesi					Jumlah
		Pelajar	Mahasiswa	PNS	Pegawai Swasta	Lainnya	
1	Januari	670	620	100	-	1.050	2.440
2	Februari	480	580	110	-	1.300	2.470
3	Maret	700	570	105	-	1.200	2.575
4	April	815	575	120	-	1.200	2.710
5	Mei	900	565	100	-	1.200	2.765
6	Juni	1.068	497	103	-	1.151	2.819
7	Juli	783	490	133	-	1.227	2.633
8	Agustus	493	427	81	-	988	1.989
9	September	757	436	104	-	998	2.295
10	Oktober	518	527	98	-	883	2.026
11	November	597	632	123	-	1.178	2.530
12	Desember	623	468	93	-	1.036	2.220
Jumlah		8.404	6.387	1.270	-	13.411	29.472
2007		10.891	8.330	1.322	-	12.096	32.639

Sumber : Bantul Dalam Angka, 2009 halaman 169

Dalam tabel terlihat pengunjung terbanyak berasal dari kalangan bukan pelajar, mahasiswa, PNS ataupun pegawai swasta. Menurut penulis, hal ini karena faktor kesibukan. Mereka yang tidak memiliki intensitas kesibukan yang tinggi, menghabiskan waktunya di perpustakaan untuk menambah pengetahuan. Perlu terus diupayakan penambahan buku-buku terbitan baru dan penyediaan pelayanan fasilitas perpustakaan yang memadai.

h. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1). Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Berikut ini merupakan tabel jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 3.36

Jumal Personil Satuan Polisi Pamong Praja, 2008

No	Jenis	Jumlah
1	Pejabat Struktural	13
2	Staf	72
	Total	85

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Rasio jumlah polisi pamong praja adalah jumlah polisi pamong praja dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Sehingga didapat hasilnya : $85/909.812 \times 10.000 = 0,93$.

Angka yang tergolong masih minim, jika dibandingkan dengan fungsinya untuk mengamankan setiap 10.000 penduduk. Maka dari itu pemerintah harus meningkatkan jumlah Satuan Polisi Pamong Praja agar keamanan dan ketertiban lebih terkendali lagi.

Dari hasil indikator di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pencapaian pada aspek pelayanan umum masih dirasa kurang baik. Karena sebagian besar indikatornya mengalami penurunan. Seperti penurunan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, persentase koperasi aktif dan jumlah pengunjung perpustakaan.

Penulis menganggap hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas SDM yang memadai, hal ini bisa dipicu oleh besarnya gaji yang mereka dapatkan. Karena penulis menganggap bahwa

besarnya gaji yang mereka peroleh berpengaruh pada kualitas kerja mereka.

Maka dari itu penulis menghimbau agar instansi-instansi yang diberi wewenang dalam mengurus masalah pelayanan, lebih meningkatkan kinerjanya lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian reward kepada para pegawai yang memiliki andil besar dalam meningkatkan kinerja instansinya.

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Nilai tukar petani

Untuk nilai tukar petani data yang tersedia adalah nilai tukar petani tingkat propinsi.

Tabel 3.37 Indeks Harga Petani dan Nilai Tukar Petani per Bulan di DIY

No	Bulan	Indeks Harga yang Diterima Petani	Indeks Harga yang Dibayar Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)
1	Januari	107,82	104,46	103,22
2	Februari	109,42	105,37	103,84
3	Maret	108,56	106,40	102,04
4	April	109,55	106,71	102,67
5	Mei	112,39	108,37	103,71
6	Juni	115,13	110,87	103,85
7	Juli	120,00	113,41	105,81
8	Agustus	122,42	114,32	107,08
9	September	125,66	114,87	109,39
10	Oktober	126,79	115,02	110,23
11	November	121,84	115,26	105,71
12	Desember	121,26	114,59	105,82
	Rata-rata	116,74	110,80	105,28
	2007	816,82	639,78	127,67

Sumber : DIY Dalam Angka, 2009 halaman 503

Nilai tukar petani propinsi DIY pada Tahun 2008 mencapai angka 105,28. Angka ini menurun dari tahun 2007 yang mencapai angka 127,67. Ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani pada tahun 2008 menurun dari tahun 2007 yaitu dari 816,82 menjadi 116,74. Begitu juga dengan indeks yang harus dibayar petani tahun 2008 sebesar 110,80 sedang di tahun 2007 sebesar 639,78.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita

Berdasar catatan Susenas tahun 2007. Persentase pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Bantul tahun 2007, untuk non makanan (pangan) adalah sebesar 52,92%.²⁵ Pengeluaran non pangan ini terdiri dari konsumsi perumahan, barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak dan asuransi kemudian keperluan pesta dan upacara.

2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

a. Aksesibilitas daerah

1). Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, total panjang jalan Kabupaten tahun 2008 adalah 899,83 Km, yang terdiri dari jalan aspal 616,48 Km, jalan kerikil MKD 86,45 Km dan jalan tanah 196,90 Km. Selain

²⁵ Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2008 hal. 61

jalan kabupaten, tercatat juga panjang jalan propinsi 154,05 Km dan panjang jalan Negara 42,24 Km, sehingga total panjang jalan di Bantul tercatat 1.096,12 Km.²⁶

Sementara itu, banyaknya kendaraan di Kabupaten Bantul berdasarkan kendaraan yang layak uji tercatat sebanyak 5.746, yang terdiri dari 495 unit kendaraan umum layak uji dan 5.251 unit kendaraan bukan umum yang layak uji.²⁷ Sedangkan banyaknya kendaraan yang terdaftar menurut jenis kendaraan dan plat dasar nomor kendaraan pada tahun 2008 tercatat sebanyak 258.331 unit kendaraan, yang terdiri dari 256.217 plat hitam, 599 plat kuning, dan 1.515 plat merah.²⁸

Berarti berdasarkan jumlah kendaraan umum dan bukan umum yang layak uji, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah : $1.096,12 \text{ km} / 5.746 = 0,19$. Dan untuk rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan plat dasar nomor kendaraan adalah $1.096,12 \text{ km} / 258.331 = 0,004$.

b. Penataan wilayah

1). Ketaatan terhadap RTRW

Dalam pelaksanaan pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat diperlukan di Kabupaten Bantul. Hal tersebut merupakan salah satu upaya perencanaan program

²⁶ Bantul Dalam Angka, 2009 hal. 275

²⁷ *ibid*

²⁸ Bantul Dalam Angka, 2009 hal. 283

pembangunan yang memperhatikan suatu tatanan wilayah yang terpadu dan teratur.

Secara garis besar arah pengembangan dan pembangunan daerah mengacu pada RTRW Kabupaten Bantul yang terbagi menjadi enam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Sedangkan peta Satuan Wilayah Pengembangan adalah sebagai berikut.²⁹

1. SWP I: Kecamatan Sedayu, Pajangan, dan sebagian Kecamatan Kasihan (Desa Bangunjiwo)
 - Bagian Utara: sebagai kawasan pertanian, agrobisnis, perdagangan, jasa serta pendidikan.
 - Bagian Selatan: sebagai kawasan industri, non polutan, perdagangan, jasa dan permukiman.
2. SWP II: Kecamatan Kasihan, Banguntapan dan sebagian Kecamatan Pleret (Desa Pleret).
 - Kawasan aglomerasi
 - Menjadi bagian Pengembangan Kota Yogyakarta: permukiman pendidikan, perdagangan dan jasa
3. SWP III: Kecamatan Piyungan, dan sebagian Kecamatan Pleret (Desa Bawuran, Wonolelo dan Segoroyoso).
 - Bagian Utara: sebagai kawasan industri, perdagangan, jasa, pertanian dan permukiman

²⁹Ibid. 38-39

- Bagian Selatan: sebagai kawasan pertanian dan wisata budaya
4. SWP IV: Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek
 - Bagian Utara: sebagai kawasan pertanian, lahan basah, agrobisnis dan permukiman.
 - Bagian Selatan: sebagai kawasan alam, budaya dan perikanan.
 5. SWP V: Kecamatan Bantul dan Sewon
 - Bagian Utara: sebagai pusat pemerintahan, perumahan, perdagangan dan jasa
 - Bagian Selatan: sebagai kawasan pertanian
 6. SWP VI: Kecamatan Imogiri dan Dlingo
 - Pembangunan diarahkan untuk kawasan pertanian
 7. SWP VII: Kecamatan Imogiri dan Dlingo
 - Bagian Barat : sebagai kawasan agribisnis, dan cagar budaya
 - Bagian Timur : sebagai kawasan cagar budaya

Untuk mendukung program kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka tiga kecamatan telah dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, yaitu Kecamatan Piyungan, Pundong dan Srandakan. Selain penataan wilayah seperti tersebut di atas, pembangunan di Kabupaten Bantul juga mengacu pada Perda No. 01 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Bantul yang menunjukkan pemanfaatan ruang wilayah.

2). Luas wilayah produktif

Wilayah produktif di Kabupaten sebagian besar berupa wilayah pertanian dan perkebunan. Hasil produksi tersebut berupa hasil tanaman pangan dan juga hasil tanaman perkebunan.

Tabel 3.38

Luas Panen Wilayah Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Keterangan	Luas Panen (ha)
1	Pertanian	
	a. Padi Sawah	25.089
	b. Padi Ladang	164
	c. Jagung	5.739
	d. Kacang Tanah	3.701
	e. Kedelai	5.290
	f. Cabai Rawit	36
	g. Tomat	3
	h. Kacang Panjang	40
	i. Jamur	17.850
2	Perkebunan	
	a. Tembakau Virginia	6,1
	b. Tembakau Rakyat	231,5
	c. Mete	386,3
	d. Tebu	1.174,99
	e. Kelapa	10.307,05
	Jumlah	70.017,94

Sumber : Sekilas Kabupaten Bantul halaman 20-23

Dari tabel terlihat luas panen padi sawah adalah yang terluas. Menurut penulis hal ini dikarenakan kondisi tanah dan iklim di wilayah Kabupaten Bantul sangat cocok ditanami padi sawah. Hal ini juga yang pada akhirnya membuat sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani.

c. Fasilitas Bank dan non bank

1). Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Banyaknya Bank Umum di Kabupaten Bantul yang tercatat di Bank Indonesia Cabang Yogyakarta tahun 2008 ada 88 unit, terdiri dari Bank dengan status Kantor Pusat 17 unit, Kantor Cabang 6 unit, Kantor Cabang Pembantu 24 unit dan Kantor Kas 41 unit.

Berikut ini daftar nama bank dan cabang-cabangnya di Kabupaten Bantul tahun 2008.

Tabel 3.39 Daftar Nama Bank Umum dan BPR di Kabupaten Bantul, 2008

Status Kantor	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jumlah
Bank Umum-Kantor Cabang					
- BRI					
- Bank BPD DIY Cabang Bantul		1	22	1	24
		1	2	10	13
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)-Kantor Pusat					
1. PD. BPR Kab. Dati II Bantul	1			17	18
2. PT. BPR Ambarketawang Persada	1			1	2
3. PT. BPR Arga Tata	1				1
4. PT. BPR Arum Mandiri Kenanga	1				1
5. PT. BPR Bina Arta Swadaya Yogyakarta	1				1
6. PT. BPR Candra Mukti Artha	1			3	4

7. PT. BPR Kartika Artha Kencanajaya	1				1
8. PT. BPR Kurnia Sewon	1			1	2
9. PT. BPR Nusamba Banguntapan	1			4	5
10. PT. BPR Arta Parama	1				1
11. PT. BPR. Profidana Paramitra	1			1	2
12. PT. BPR Swadharma Bangun Artha	1	2			3
13. PT. BPR Swadharma Artha Nusa	1	2		1	4
Bank Perkreditan Rakyat					
1. PT. BPR Tandu Artha	1			1	1
2. PT. BPRS Bangun Drajad Warga	1			1	2
3. PT. BPRS Margirizki Bahagia	1				2
4. PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera	1				1
Jumlah	17	6	24	41	88
2007	17	6	24	33	58

Sumber: Bantul Dalam Angka, 2009 halaman 307-308

Jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 34,09%. Menurut penulis, hal peningkatan ini dikarenakan semakin tingginya minat masyarakat terhadap kredit yang disediakan dan keinginan untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan ataupun deposito di bank.

Pada bulan Desember 2008, besarnya dana masyarakat yang terhimpun dalam bentuk tabungan tercatat Rp. 652.449 juta dengan 299.950 penabung dan dalam bentuk deposito tercatat Rp. 291.683 juta dengan 10.314 deposan. Sedangkan

jumlah kredit yang disalurkan pada Desember 2008 sebesar Rp. 2.982.823 juta dengan jumlah debitur 170.664 nasabah.³⁰

d. Ketersediaan air bersih

1). Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Berdasarkan data dari PDAM Kabupaten Bantul. Pada Tahun 2008, tercatat terdapat 11.625 pelanggan dari jenis pelanggan rumah tangga yang menggunakan air bersih dari PDAM. Yang terdiri dari Rumah Tangga A1 sebanyak 7.061, Rumah Tangga A2 sebanyak 4.424 dan Rumah Tangga B sebanyak 140.³¹ Dengan jumlah rumah tangga berdasarkan hasil pendaftaran rumah tangga sebanyak 227.759.³² Maka dari itu didapat persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah sebesar 5,10%.

Menurut penulis hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk memiliki sumur sendiri yang digunakan sebagai fasilitas MCK maupun sebagai sumber air minum. Karena dirasa telah cukup, maka mereka tidak perlu lagi menjadi pelanggan PDAM. Oleh karena itu berdasarkan versi PDAM sangat sedikit sekali yang menjadi pelanggan. Karena mereka

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid. hal. 255

³² Ibid. hal. 191

telah menganggap bahwa air yang mereka gunakan adalah air bersih.

e. Fasilitas listrik dan telepon

1). Rasio ketersediaan daya listrik

Daya listrik terpasang sebesar 171.774.734 dengan kebutuhan energi sebesar 23.462.960. Dengan demikian rasio ketersediaan daya listrik adalah 7,32.

Tabel 3.40
Banyaknya Pelanggan Listrik, Daya Terpasang dan Energi Terjual Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul, 2008

No	Kecamatan	Banyaknya Pelanggan	Daya Terpasang	Energi Terjual
1	Srandakan	6.314	3.940.450	593.763
2	Sanden	7.137	4.122.800	486.799
3	Kretek	7.605	4.839.100	592.838
4	Pundong	7.524	4.155.450	486.089
5	Bambanglipuro	9.197	5.527.130	631.017
6	Pandak	10.243	5.870.850	732.465
7	Bantul	14.820	13.382.850	1.764.756
8	Jetis	12.439	7.840.700	913.708
9	Imogiri	12.035	7.062.670	853.386
10	Dlingo	6.768	4.347.575	499.790
11	Pleret	9.405	6.196.100	801.812
12	Piyungan	10.772	8.530.195	1.175.841
13	Banguntapan	25.964	27.846.109	4.088.796
14	Sewon	23.904	26.628.491	4.067.312
15	Kasih	19.898	20.868.744	2.308.399
16	Pajangan	6.693	4.218.650	528.226
17	Sedayu	15.635	16.396.870	2.937.963
	Jumlah	206.353	171.774.734	23.462.960

Sumber : Bantul Dalam Angka, 2009 halaman 253

Setiap 7,32 daya listrik terpasang dapat memenuhi setiap kebutuhan energi. Maka dari itu penulis berkesimpulan bahwa

ketersediaan daya listrik di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 sudah memadai. Untuk kedepannya tetap diperlukan peningkatan terhadap perbandingan antara daya listrik terpasang dengan energi yang terjual. Agar ketersediaannya lebih memadai lagi. Untuk masyarakat, tetap diperlukan kesediaannya dalam melakukan penghematan terhadap energi, agar tidak banyak energi yang terbuang sia-sia. Sehingga sudah tidak terdengar lagi adanya pemadaman listrik bergilir.

2). Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Energi listrik pada saat sekarang sudah merupakan energi yang vital dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jumlah pelanggan yang menggunakan listrik tercatat sebanyak 206.353. Sementara jumlah rumah tangga yang tercatat pada sensus pertanian sebanyak 227.759.³³ Dengan demikian persentasenya adalah : $206.353/227.759 \times 100\% = 90,60\%$.

Penulis berpendapat bahwa hal ini merupakan capaian yang baik. Listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak kegiatan yang dilakukan yang tidak bisa terlepas dari peran listrik. Sudah menjadi hal yang wajar jika semua penduduk terfasilitasi oleh adanya listrik.

³³ Ibid, hal. 191

Untuk kurang lebih 9,4% penduduk yang belum menjadi pelanggan listrik pada tahun 2008. Seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah agar turun tangan memberikan bantuannya. Karena bisa jadi alasan mereka tidak memasang listrik karena tidak memiliki anggaran yang cukup untuk biaya pemasangan.

f. Ketersediaan restoran

1). Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Jumlah rumah makan (restoran) di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 adalah sebanyak 254. Paling banyak terdapat di Kecamatan Bantul sebanyak 43, Kretek sebanyak 37 dan Sewon sebanyak 32, sementara sisanya di kecamatan lainnya.

Keberadaan rumah makan sangat diperlukan oleh para pengunjung wisata khususnya. Apalagi Kabupaten Bantul memiliki obyek wisata yang banyak. Dari data Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Pada tahun 2008, tercatat sebanyak 1.284.788 wisatawan domestik dan 26.220 wisatawan asing. Penulis berpendapat bahwa fasilitas restoran masih tetap perlu dikembangkan demi perkembangna kemajuan wilayah Kabupaten Bantul dalam hal pariwisata.

g. Ketersediaan penginapan

1). Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Berdasarkan catatan Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tahun 2008 terdapat 184 hotel non bintang dan satu hotel bintang tiga.

Tabel 3.41

Klasifikasi Hotel di Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1	Bintang Tiga	1
2	Non Bintang	184
	Jumlah	185

Sumber : Sekilas Kabupaten Bantul halaman 32

Seperti halnya dengan restoran, hotel juga tak lepas dari para wisatawan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan yang baik. Agar para pengunjung mendapatkan fasilitas yang memadai sehingga merasa nyaman berada di wilayah obyek wisata Kabupaten Bantul.

3. Iklim Berinvestasi

a. Keamanan dan ketertiban

1). Angka kriminalitas

Angka kriminalitas dapat diketahui berdasarkan pengaduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode satu tahun.

Tabel 3.42

Data Tindak Kriminal Di Kabupaten Bantul Tahun 2007 dan 2008

No	Tindak Kriminal	Tahun	
		2007	2008
1	Curas	106	193
2	Curat	24	29
3	Curanmor	67	54
4	Pencurian Biasa	43	54
5	Penganiayaan Berat	35	28
6	Pembunuhan	4	9
7	Pemeriksaan	3	5
8	Perzinaan	2	3
9	Pencabulan	3	4
10	Melarikan Gadis	4	3
11	Pemerasan	3	3
12	Penggelapan	44	51
13	Penipuan	54	78
14	Pemalsuan Surat	3	1
15	Kebakaran	1	16
16	Perjudian	20	31
17	Pengrusakan	3	3
18	Pengeroyokan	27	11
19	Penculikan	1	-
20	Penghinaan	1	-
21	Membawa Sajak	2	-
22	Perlindungan Anak	1	5
23	Perbuatan Tidak Menyenangkan	6	1
24	KDRT	16	5
25	Pencemaran Nama Baik	3	-
26	Tipiring	12	-
27	Miras	67	30
28	Menyediakan Tempat Cabul	1	-
29	Keterangan Palsu	1	-
30	Lakaka	-	1
31	Melanggar UU 23/1992	-	4
32	NARKOBA	14	14
33	SENPI	1	-
34	Uang Palsu	1	1
	Jumlah	573	637

Sumber : Polres Kabupaten Bantul, Tahun 2009³⁴

Pada tahun 2008 mencapai angka : $637/856.206 \times 10.000 =$

7,43. Sementara di tahun 2007 berada pada angka :

$573/831.657 \times 10.000 = 6,88$. Berarti angka kriminalitas di

³⁴ Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 hal. 225

Kabupaten Bantul antara tahun 2007-2008 mengalami peningkatan sebesar 0,55 atau sebanyak 64 tindakan kriminal. Persentase peningkatan jumlah tindak kriminalnya sendiri sebesar 10,04%. Yakni sebanyak 573 tindak kriminal pada tahun 2007 meningkat menjadi 637 pada tahun 2008.

Hukum harus lebih ditegakkan agar tercipta masyarakat yang sadar hukum. Dapat dilakukan dengan peningkatan intensitas patroli keliling dibantu dengan perkumpulan ronda di masyarakat. Agar para pelaku tindak kriminal mengetahui betapa bahayanya melakukan tindak kriminal di Kabupaten Bantul.

b. Kemudahan Perijinan

1). Lama Proses Perijinan

Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari). Pada tahun 2008, lama proses perijinan di Kabupaten Bantul adalah 30 hari. Namun di tahun 2009 menjadi 12 hari.

Kabupaten Bantul memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat di bidang pelayanan publik terutama kinerja dari perijinan yang mampu mempercepat proses perijinan dari satu pintu, yakni dari 30 hari menjadi 12 hari.³⁵

Menurut pandangan penulis, hal tersebut juga berpengaruh pada kondisi iklim berinvestasi. Proses perijinan yang tidak

³⁵ Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantul, Ir. Pulung Haryadi, MSc. Pada tanggal 02/11/2010 di Kantor Bappeda Bantul

terlalu lama, biasanya disukai oleh para investor yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Bantul. Sehingga proses perijinan yang cepat didukung dengan pelayanan yang baik akan membuat iklim berinvestasi menjadi semakin kondusif.

c. Perda

1). Jumlah perda yang mendukung iklim usaha

Berikut ini merupakan beberapa Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Bantul pada tahun 2008.

Tabel 3.43
Peraturan Daerah Tahun 2008 yang Mendukung Iklim Usaha

NO	NO PERDA	TENTANG
1	07 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2002 Tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul
2	08 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2002 Tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul
3	11 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
4	14 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul
5	15 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul
6	16 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul
7	17 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 04 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul
8	20 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor

Sumber : Database Profil Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2009 hal. 162-163

seluruh jumlah penduduk pada tahun tersebut. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Bantul tahun 2008 adalah 508,048. Ini berarti terdapat sekitar 508 lulusan S1/S2/S3 setiap 10.000 penduduk. Dengan demikian pemerintah semakin terbantu dalam meningkatkan derajat otonomi daerah agar lebih baik lagi.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan terutama dalam bidang inventarisasi, yaitu dilakukan dengan banyak cara, seperti diklat mengenai keuangan dan aset daerah. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk mencapai derajat otonomi daerah yang terbaik.³⁷

Menurut penulis hal tersebut merupakan tindakan yang tepat, mengingat masalah SDM merupakan salah satu faktor kendala penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun 2008. Untuk itu program-program pembekalan pengetahuan, seperti diklat sangat diperlukan.

b. Tingkat ketergantungan

1). Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh

³⁷ Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantul, Ir. Pulung Haryadi, MSc. Pada tanggal 02/11/2010 di Kantor Bappeda Bantul

setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Tabel 3.44

Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan di Kabupaten Bantul 2008

Jenis Kelamin	Rasio Ketergantungan		Total
	Usia 0 – 14 tahun	Usia 65 ke atas	
Laki-laki	30	12	42
Perempuan	31	15	45
Jumlah	30	13	44

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat halaman 72

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka ketergantungan total Kabupaten Bantul sebesar 44. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap 44 penduduk non produktif akan ditanggung oleh 100 orang penduduk produktif. Menurut jenis kelamin, angka ketergantungan perempuan yaitu sebesar 45 sedikit lebih tinggi daripada laki-laki yang tercatat sebesar 42.

Jika dilihat dari komposisi usia, angka ketergantungan usia 0-14 tahun sebesar 30. Berarti bahwa 30 penduduk usia 0-14 tahun ditanggung oleh sekitar 100 penduduk usia produktif (15-64) tahun. Sementara besarnya angka ketergantungan lansia (65 tahun ke atas) jauh lebih kecil yaitu hanya sebesar 13.

Tingginya angka ketergantungan pada usia muda ini disebabkan oleh masih tingginya angka kelahiran. Hal ini

merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi karena sebagian pendapatan yang diperoleh seharusnya untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kualitas SDM terpaksa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan. Melihat akibat yang ditimbulkan dari besarnya angka ketergantungan tersebut, baik menurut komposisi umur maupun jenis kelamin, maka sasaran kebijakan pemerintah seharusnya dapat mendorong penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktivitas dalam perekonomian dan meningkatkan kualitas SDM.

Dari keseluruhan indikator daya saing daerah yang penulis dapat, penulis menyimpulkan bahwa kinerjanya sudah tergolong baik. Terutama jika membandingkan dengan tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pencapaian, yaitu peningkatan jumlah bank sebesar 34,09%

Keberadaa bank di Kabupaten Bantul dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Misalnya kredit usaha yang disediakan akan mampu menciptakan pemerataan pendapatan dan iklim berinvestasi yang baik.